



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG

INSPEKTORAT

**LAPORAN HASIL EVALUASI SISTEM AKUNTABILITAS
KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (SAKIP)
PADA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN SATU PINTU
KABUPATEN PEMALANG**

**NOMOR : 700/74/TIM.II/IRB.III 2019
TANGGAL : 5 AGUSTUS 2019**

SEKRETA
ATGAS SABI
KABUPATEN PEMALANG



PEMERINTAH KABUPATEN PEMALANG
INSPEKTORAT

Pemalang, 5 Agustus 2019

Nomor : 700/74/RHS/2019
Lampiran : -
Perihal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah.

Kepada Yth.
Kepala Dinas Penanaman
Modal dan Pelayanan Terpadu
Satu Pintu Kab. Pemalang
Di --

PEMALANG

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 20 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP) Kabupaten Pemalang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Perencanaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, kami sampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Tujuan evaluasi adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau tanggungjawab atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka wujudnya pemerintahan yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi:

- Perencanaan Kinerja;
- Pengukuran Kinerja;
- Pelaporan Kinerja;
- Evaluasi Internal, dan
- Capaian Kinerja.

Jalan Pemuda Nomor 44 Pemalang 52313
Telepon (0284) 321254 – 322339 Fax (0284) 321254

SEKRET
ATGAS SABI
KABUPATEN PEMALANG

Dokumen yang digunakan sebagai data pendukung evaluasi antara lain Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Tahun 2018, Rencana Strategis Tahun 2016-2021, dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/Renja Tahun 2018 dan Tahun 2019, dokumen Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2018, serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi

Berdasarkan hasil evaluasi yang telah dilakukan oleh Tim Evaluator menunjukkan bahwa Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memperoleh nilai atau skor sebesar **58,57** dengan kategori **CC (Cukup)**. Penilaian tersebut menunjukkan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang memiliki akuntabilitas kinerja yang cukup baik, taat kebijakan, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk memproduksi informasi kinerja untuk pertanggungjawaban, perlu perbaikan tidak mendasar. Penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

Nilai **CC** merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang dengan rincian sebagai berikut.

No.	Komponen	Bobot	Nilai Hasil Evaluasi	
			Th. 2017	Th. 2018
1.	Perencanaan Kinerja	30 %	14,47	22,28
2.	Pengukuran Kinerja	25 %	4,69	11,88
3.	Pelaporan Kinerja	15 %	7,16	8,49
4.	Evaluasi Internal	10 %	0,71	1,54
5.	Capaian Kinerja	20 %	7,79	14,38
	Jumlah		34,82	58,57

Selain mempertimbangkan nilai kualitas penerapan (capaian) juga menilai dan melihat kondisi terakhir, praktik dan hal-hal substansif yang telah diwujudkan dan dilakukan serta konsistensi dan keberlanjutan (*sustainability*) implementasinya, terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan guna perbaikan dan penyempurnaan, adapun rinciannya adalah sebagai berikut :

No	Uraian Hasil Evaluasi	Bobot	Nilai
A	Perencanaan Kinerja	30	22,28
I	Perencanaan Strategis	10	7,33
	<p>Dokumen Rencana Strategis (Renstra) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya disebut Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang sudah disusun dan dipublikasikan. Tujuan dalam Renstra sudah dilengkapi dengan indikator kinerja tujuan beserta target pencapaiannya.</p> <p>Indikator (ukuran keberhasilan) yang baik adalah indikator yang memiliki kriteria SMART-C (<i>specific, measurable, achievable, relevan, timebond</i> dan cukup) serta berorientasi hasil. Indikator berorientasi hasil yang dimaksud antara lain harus berkualitas <i>outcome</i> atau <i>output</i> penting, bukan proses/ kegiatan, menggambarkan kondisi atau <i>output</i> penting yang ingin diwujudkan atau seharusnya terwujud, terkait dengan isu strategis organisasi dan sesuai dengan tugas dan fungsi organisasi.</p> <p>Namun demikian, menurut evaluator bahwa 2 indikator dari 3 indikator sasaran yang dimiliki masih belum memenuhi kriteria SMART-C, yaitu:</p> <ul style="list-style-type: none"> ▪ Indikator "Peningkatan Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan". Indikator ini sudah relevan dengan sasaran, namun masih bersifat <i>outcome</i> juga tidak terukur. Menurut evaluator, indikator yang lebih sesuai misalnya "Indeks Kepuasan Masyarakat Terhadap Pelayanan Perijinan dan Non Perijinan". ▪ Indikator "Persentase Pengaduan Pelayanan Perijinan dan Investasi Yang Ditindaklanjuti/Ditangani". Indikator ini dapat diukur dan berorientasi hasil, namun 		

	tidak relevan dengan sasaran. Karena hal yang lebih menunjukkan kepuasan masyarakat adalah menurunnya jumlah pengaduan bukan pengaduan yang tertangani.		
II	Perencanaan Kinerja Tahunan	20	14,95
	<p>Dokumen perencanaan kinerja yang bersifat tahunan sudah disusun, namun demikian masih terdapat beberapa kelemahan terkait implementasi perencanaan kinerja tahunan antara lain:</p> <ol style="list-style-type: none">1. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran <p>Berdasarkan keterangan evaluatan, bahwa pada tahun 2019 telah diupayakan sistem perencanaan berbasis <i>e-planning</i> yang dikoordinasikan oleh BAPPEDA Kabupaten Pemalang untuk penyusunan dokumen perencanaan TA 2020 dengan menginput data indikator kinerja dan targetnya. Output data dari sistem tersebut diharapkan dapat dimanfaatkan dalam penentuan PPAS atau dengan kata lain bahwa indikator kinerja dan targetnya tersebut menjadi prasyarat pengajuan anggaran. Namun demikian, sampai dengan saat evaluasi ini dilakukan, belum ada bukti pemanfaatan secara riil atas output data dari sistem tersebut sebagai prasyarat pengajuan dan pengaokasian anggaran.</p> <ol style="list-style-type: none">2. Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor pencapaiannya, namun masih terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja. <p>Berdasarkan keterangan evaluatan, diketahui bahwa capaian target kinerja dalam Rencana Aksi telah dilakukan monitoring/evaluasi secara periodik (setiap</p>		

	<p>3 bulan). Namun demikian, monitor atas capaian target rencana aksi tersebut hanya disertai bukti-bukti monitoring/evaluasi, belum disertai dengan analisis dan alternatif solusi pada setiap deviasi. Lebih jauh, belum ada mekanisme dan implementasi <i>reward</i> dan <i>punishment</i> terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja pada Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang.</p> <p>Pemanfaatan Rencana Aksi atas kinerja masih terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya.</p>		
B	Pengukuran Kinerja	25	11,88
	<p>Evaluasi terhadap pengukuran kinerja secara umum dapat dilakukan dengan menilai indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal. Berdasarkan pengukuran IKU, terdapat beberapa hal yang perlu mendapatkan perhatian dalam rangka upaya perbaikan secara berkelanjutan, yaitu:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Indikator kinerja individu yang selaras dalam arti merupakan <i>breakdown</i> dari indikator kinerja atasannya dan memiliki hubungan kausalitas dengan indikator kinerja atasannya baru ditemukan pada tingkatan manajerial saja dan pada sebagian kecil staf. 2. Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas belum dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward and punishment</i>. 3. Pelaksanaan evaluasi internal belum didukung dengan pendokumentasian. 		

C	Pelaporan Kinerja	15	8,49
	<p>Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang telah menyusun LKJIP tahun 2018, disampaikan tepat waktu dan telah dipublikasikan. Namun demikian masih terdapat kekurangan dalam hal :</p> <p>Laporan kinerja tahun 2018 telah menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia. Menurut evaluator, penyajian analisis efisiensi penggunaan sumber daya manusia masih minim karena hanya menyajikan jumlah pegawai tahun 2018 berdasarkan tingkat pendidikan. Efisiensi atau tidaknya penggunaan jumlah pegawai tersebut belum menggambarkan keterkaitan dengan capaian kinerja Dinas PMPTSP tahun 2018.</p> <p>Demikian juga informasi analisis efisiensi penggunaan anggaran. Laporan kinerja hanya menyajikan perbandingan antara realisasi penggunaan anggaran tahun 2018 dengan capaian kinerja tahun 2018. Laporan kinerja belum dapat menyajikan efisiensi penggunaan anggaran tahun 2018 dalam mencapai kinerja Dinas PMPTSP tahun 2018. Sedangkan menurut keterangan evaluator, bahwa tidak adanya penjelasan terkait efisiensi penggunaan anggaran dalam pencapaian kinerja tahun 2018 karena sudah dijelaskan dalam laporan lain dalam bentuk laporan pengendalian kegiatan (Daloptan).</p>		
D	Evaluasi Internal	10	1,54
	<p>Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya telah dilakukan oleh Kepala Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang melalui rapat internal (<i>staff meeting</i>) terutama pada saat menjelang perubahan anggaran. Sedangkan evaluasi atas program-program yang dilaksanakan serta evaluasi rencana aksi dalam rangka</p>		

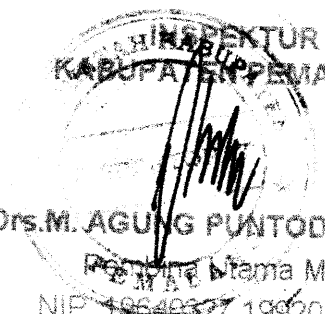
	mencapai sasaran dan tujuan organisasi, diakui bahwa evaluasi dilakukan hanya saja menurut evaluator belum memenuhi kriteria evaluasi program dan rencana aksi yang seharusnya. Hal tersebut didasarkan pada belum adanya bukti bahwa evaluasi atas program dan rencana aksi telah disertai dengan analisis serta simpulan tentang kondisi sebelum dan sesudah dilaksanakannya suatu program. Selain itu, belum ada dukungan dokumentasi yang memadai menyangkut analisis tentang perubahan target yang dituju atas program dan kegiatan.		
E	Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi	20	14,38
	Semua pencapaian kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pematang yang disajikan dalam LKJIP tahun 2018 adalah merupakan capaian <i>outcome</i> . Hanya saja, masih terdapat sasaran yang belum memenuhi kriteria berorientasi hasil sesuai dengan apa yang telah disampaikan pada Poin A, sehingga penilaian atas pencapaian sasaran/kinerja organisasi kurang optimal.		
	Jumlah	100	58,57

Terhadap hasil evaluasi di atas, kami merekomendasikan agar dilakukan langkah-langkah perbaikan oleh Dinas Penanaman Modal Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Pematang sebagai berikut.

- a. Memperbaiki indikator kinerja sasaran agar seluruhnya memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik yaitu kriteria SMART (*Specific, Measurable, Achievable, Relevan dan Timebond*)
- b. Memanfaatkan hasil pengukuran kinerja sebagai dasar pemberian *reward* dan *punishment*;
- c. Meningkatkan kualitas evaluasi program/kegiatan terutama lebih memfokuskan pada capaian kinerja yang bersifat hasil (*outcome*) dan melengkapi hasil evaluasi tersebut dengan dokumen dan rekomendasi yang dapat dilaksanakan guna peningkatan kinerja;

- d. Memanfaatkan hasil evaluasi untuk melakukan perbaikan perencanaan kinerja di masa yang akan datang, perbaikan penerapan manajemen kinerja serta untuk mengukur keberhasilan unit kerja.

Demikian hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja Dinas PMPTSP Kabupaten Pemalang yang dapat kami sampaikan, untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.


Drs. M. AGUNG PUNTODEWO, M.Si.
Pemerintah Pemuda Muda
NIP. 19640327 199201 1 002

Tembusan : Kepada Yth

1. Bupati Pemalang (sebagai laporan),
2. Kasubbag. Adum pada Inspektorat Kabupaten Pemalang.

SEKRETA
ATGAS SABA
KABUPATEN PEMALANG